

ABSTRAK

Tesis ini berjudul “PEMUNGUTAN PAJAK AIR PERMUKAAN TERHADAP PERUSAHAAN PERTAMBANGAN SEBAGAI PEMEGANG KONTRAK KARYA DENGAN PEMERINTAH” dengan 2 rumusan masalah, yaitu: 1. Kewenangan Pemungutan Pajak Air Permukaan dalam kontrak karya perusahaan pertambangan dengan pemerintah, 2. Akibat Hukum Putusan Mahkamah Agung Nomor 319/B/PK/Pjk/2018 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 320/B/PK/Pjk/2018 dalam penyelesaian sengketa Pajak Air Permukaan.

Penelitian ini adalah jenis penelitian hukum dengan metode hukum normatif. Penelitian ini menggunakan Pendekatan Perundang-undangan, Pendekatan Konseptual, dan studi kasus.

Hasil dari penelitian ini antara lain kewenangan pemungutan Pajak Air Permukaan ini merupakan kewenangan dari Pemerintah daerah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, Perusahaan tambang walau menjalani kontrak dengan pemerintah tetap harus membayar pajak tersebut ke Pemerintah Provinsi, kemudian akibat hukum dari Putusan Mahkamah Agung tersebut ialah seharusnya pemerintah pusat dan daerah menghormati kontrak karya tersebut namun menjadi pembelajaran dan dapat diterapkan yang seharusnya menjadi kewenangan pemerintah daerah yang seharusnya sebuah kontrak karya dibuat dengan memperhatikan kepentingan nasional dan efek atas lingkungan terutama sumber air yang terjadi dengan melakukan kontrak tersebut. Selain itu perlu diperhatikan asas kebebasan berkontrak tetap memiliki batasan, salah satunya undang-undang dilihat pada pasal 1337 KUHPerdara bahwa suatu perjanjian harus dilandaskan sebab yang halal, isi perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan maupun dengan ketertiban umum.

Kata kunci: Pajak Air Permukaan, Kontrak Karya, Kewenangan Pemerintah

ABSTRACT

This thesis is entitled "COLLECTION OF SURFACE WATER TAXES ON MINING COMPANIES AS CONTRACT HOLDERS OF WORK CONTRACT WITH THE GOVERNMENT" with 2 formulations of the problem, namely: 1. Authority of Surface Water Tax Collection in mining company contractual works, 2. Legal Impact of the Supreme Court Decision Number 319/B/PK/Pjk/2018 and Supreme Court Decree Number 320/B/PK/Pjk /2018 in the settlement of Surface Water Tax disputes.

This research is a type of legal research with normative legal methods. This research uses a statutory approach, conceptual approach, and case study.

he results of this study include the authority of the collection of the Surface Water Tax, which is the authority of the regional government in accordance with Law 28 of 2009 concerning Regional Taxes and Regional Levies. Mining companies, even though undergoing a contract with the government, still have to pay the tax to the Provincial Government. The verdict of the Supreme Court is that the central and regional governments should respect the contract of work but it can be learned and can be applied which should be the authority of the regional government that a contract of work should be made with due regard to national interests and the effects on the environment especially water sources that occur by carrying out the contract. In addition, it should be noted that the principle of freedom of contract still has limitations, one of which is the law seen in article 1337 of the Civil Code that an agreement must be based on a halal cause, the contents of the agreement do not conflict with the law, decency or public order.

Keywords: Surface Water Tax, Contract of Work, government authority

KATA PENGANTAR

Penulis memanjatkan Puji dan Syukur kepada Allah Bapa, Yesus Kristus dan Bunda Maria karena berkat kasih sayang, limpahan Rahmat dan Karunia Nya kepada saya sehingga laporan penelitian tesis untuk syarat memperoleh gelar Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang berjudul telah sampai pada tahap akhir.

Dengan hal tersebut saya menyadari bahwa tanpa dukungan serta bantuan berbagai pihak yang secara tulus dan ikhlas semua proses yang panjang dan melelahkan ini tidak akan berhasil. Dari itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Moch. Nasih, S.E., M.T., Ak, selaku Rektor Universitas Airlangga;
2. Ibu Nurul Barizah, S.H., LL.M., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan kebijakannya sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini;
3. Ibu Dr. Mas Rahmah, S.H., M.H., LL.M selaku Koordinator Program Magister Kenotariatan Universitas Airlangga, yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini;
4. Ibu Dr. Sarwirini, S.H., M.S selaku dosen pembimbing utama dan Bapak Dr. Ghansham Anand, S.H., M.Kn sebagai Pembimbing Kedua yang telah tulus, ikhlas dan penuh perhatian telah melayani penulis dalam seluruh proses bimbingan meskipun dalam berbagai kesibukan sekalipun, dengan kesabaran masih berkesempatan menerima saya dan memberikan masukan sangat berharga serta berkonsultasi dalam proses penulisan tesis ini.
5. Ibu Dr. Rr. Herini Siti Aisyah, S.H., M.H, Ibu Indrawati,SH,LL.M., Bapak Dr. Deddy Sutrisno S.H.,M.H, sebagai dewan penguji tesis yang telah memberikan ilmu, nasihat dan saran kepada penulis demi kesempurnaan tesis ini;
6. Bapak Dian Purnama Anugerah, S.H.,M.Kn.,L.LM sebagai Dosen Wali yang telah mengarahkan dan melancarkan urusan adminitrasi;
7. Bapak dan Ibu Dosen Pengajar pada Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang telah dengan sabar mendidik dan memberikan ilmu selama penulis menempuh pendidikan;

8. Bapak dan Ibu Staf Akademik Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Airlangga yang selama ini telah membantu kelancaran proses perkuliahan penulis;
9. Bapa Kotan Yohanes Sfetanus, dan Mama Kristofora Bantang, terima kasih yang tidak terhitung dan tidak terbalaskan kepada kedua orang tua penulis, yang dengan kesabaran dan kerelaan hati mendorong untuk mencapai keberhasilan yang penulis capai saat ini. Mereka selalu mendoakan dan mendukung baik secara materiil maupun moril yang tiada pernah henti-hentinya. Terima kasih banyak mama dan bapa;
10. Kakak Betrice Kotan, Kakak Ipar Alfin Toda, dan Kakak Yoanista Kotan. Terima kasih secara khusus kepada saudara-saudari yang selalu dengan sabar dan penuh perhatian memberikan dukungan untuk keberhasilan ini. Terima kasih penulis sampaikan;
11. Oma Bernadeta Emi, Om, tante, bapa mama keluarga besar Lembata dan Manggarai, semua sepupu, keponakan yang cantik dan ganteng yang menjadi penyemangat dan memberikan perhatiannya terimakasih banyak;
12. Philosopia Wisung, Bernadeta Magno, Isabela Kilimandu, Nadya Gomes I, Lydia Gomes I, Wily Merukh, Jacksica Ferdinan, Ovie Fafo terima kasih untuk segala jenis bentuk perhatian, pengertiannya dan kebaikan hati kalian. Benar-benar bersyukur punya kalian sebagai saudara;
13. Ananda Thei, Novhy Loudoe, Lian Amekan, Diana Bangi, Puput Sukardan, Maria Nasty, Waty Laba, Jenny Bahi, LylytaWabang, Nona Shay, Fransisco Fernandez, Para Pendengar sejati yang selalu mendengar keluh kesah ku setiap hari, serta selalu meyakinkan disaat ragu;
14. Santhy Ainun S.H., MKn., Lydia Gotama S.H., MKn., Sonia Caroline Batubara S.H., MKn., Nadya Rizky Nakayo S.H., MKn., Rico Andrian S.H., teman seperjuangan saya sejak hari pertama. Terima Kasih untuk semangatnya dan semua ketulusan hatinya;
15. Terima kasih juga saya sampaikan kepada rekan-rekan seperjuangan ditanah rantau Surabaya, Petrus Tolang, Uncyanus Nahak, Chris Zina, Mensy Korebima, Jelly Mones, Wiku Setiadi, Maria Festy, Asty Valen, Alex Pally dan seluruh keluarga besar FLOBAMORA Surabaya;
16. Kiki Kusumawati, Anisa Qurrotu, Diva Kirana, Fildzah Azatil, Niken Rizqa, Ucy Nadjmiyah, teman-teman ceria kos Karwis terima kasih sudah selalu memberikan semangat, dukungan, tawa, makanan minuman yang banyak kepada penulis.

17. Teman-Teman Kelas A Pagi Kenotariatan 2018 terima kasih sudah berbagi hari, serta berbagi ilmu,. Senang bisa kenal kalian.
18. Semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu persatu, terimakasih atas segala perhatian dan bantuannya, terutama doanya. Semoga Tuhan Yang MahaKuasa selalu melindungi kalian dan mempermudah dalam segala usahanya.

Akhirnya penulis menyadari bahwa tesis yang dihasilkan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena kekurangan dan keterbatasan penulis. Masukan dan koreksi sangat dibutuhkan agar naskah ini dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pajak kedepannya.

Surabaya, 16 Januari 2020

Penulis,

Geradin Mayela Jivisina Kotan.,S.H

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Burgerlijk Wetboek voor Indonesie (BW)

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4380*)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 Tentang Sumber Daya Air (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377*)

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438*)

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724*)

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral Dan Batu Bara (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959*)

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 211, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4953*)

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Perpajakan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049*)

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059*)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076*)

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan
(*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601*)

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 26 Tahun 2018 (*Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 596*)

Keputusan Menteri Pertambangan dan Energi Nomor 1409.K/201/M.PE/1996
Tentang Tata Cara Pengajuan Pemrosesan Pemberian Kuasa Pertambangan,
Izin Prinsip, Kontrak Karya Dan Perjanjian Karya Penguasaan Pertambangan
Batu Bara